

## Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi

<https://jurnal.feb-umi.id/index.php/ATESTASI>

This Work is Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License



# Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Audit, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Ukuran Daerah terhadap Kualitas Pelayanan Publik: Temuan Audit sebagai Variabel Intervening

Kartika Thoyibbah <sup>(1\*)</sup> Triyono <sup>(2)</sup> Noer Sasongko <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Magister Akuntansi, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

<sup>(2,3)</sup> Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Corresponding author. Kartika Thoyibbah  
[w100230023@student.ums.ac.id](mailto:w100230023@student.ums.ac.id)

	Abstrak
<p><b>Kata Kunci:</b> tindak lanjut rekomendasi audit; SPIP; ukuran daerah; temuan audit; kualitas pelayanan publik</p> <p><b>Pernyataan Penulis:</b> Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.</p> <p>Copyright © 2025 Atestasi. All rights reserved.</p>	<p><b>Tujuan:</b> Menganalisis pengaruh tindak lanjut rekomendasi audit, SPIP, dan ukuran daerah terhadap pelayanan publik dengan temuan audit sebagai mediasi pada pemerintah kota/daerah di Jawa Tengah tahun 2021-2023.</p> <p><b>Desain Penelitian dan Metodologi:</b> Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kuantitatif dengan model analisis regresi berganda menggunakan alat ukur SPSS. Pengujian masing-masing variabel independent dengan uji parsial dan variabel mediasi menggunakan uji sobel test. Pengambilan sampel dengan cara sampel jenuh pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2021-2023 menggunakan sumber data sekunder.</p> <p><b>Hasil dan Pembahasan:</b> Temuan menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah, tetapi tidak signifikan. Sebaliknya, SPIP dan ukuran daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah. Temuan audit memiliki peran memediasi hubungan tindak lanjut rekomendasi audit dan pelayanan publik di Jawa Tengah, sedangkan tidak memediasi pada hubungan SPIP dan ukuran daerah pada kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah</p> <p><b>Implikasi:</b> Penelitian mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik dapat mendukung konsep tata kelola pemerintahan. Secara praktis, penelitian dapat digunakan sebagai acuan evaluasi dan perbaikan mekanisme pelayanan publik di Jawa Tengah. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan data primer dengan metode kualitatif.</p>

## Pendahuluan

Perubahan pasca reformasi pada tahun 1990-an mengubah kewenangan pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintah pusat dalam hal pendapatan dan belanja daerah, meningkatkan pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik (Yamin et al., 2022; Aikins et al., 2023). Tujuan utama dibentuknya pemerintah daerah adalah untuk mewujudkan keseimbangan antara kewenangan untuk mendapatkan pendapatan dan kewajiban pemerintah daerah (Lestari & Rohman, 2022). Pemberian otonomi tersebut berupa peningkatan pelayanan publik yang baik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung kehidupan yang demokratis (Muluk et al., 2021; Sakti et al., 2023).

Penyelenggaraan ini diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 yang diperbarui menjadi UU No. 23 tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah. Keberhasilan suatu pemerintahan tersebut secara garis besar menunjukkan pada kepuasan masyarakat dengan tercapainya tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan (Putu, 2024), (Syofyan et al., 2021). Dengan tercapainya kesejahteraan rakyat, menunjukkan bahwa pemerintahan berhasil dalam menjalankan program yang direncanakan (Rahayu et al., 2020; Azhar et al., 2022). Di sisi lain, masyarakat memiliki peran penting dalam proses pengawasan dan evaluasi kebijakan yang dijalankan pemerintah (Yuni & Triyono, 2022).

Audit menjadi alat penting dalam evaluasi kegiatan pemerintah, memberikan informasi, dan menunjukkan kinerja perangkat pemerintahan. Hasil audit akan memberikan respon pemerintah daerah/kota dalam memperbaiki atau mempertahankan kualitas penilaian dari auditor. Di sisi lain, keberhasilan penerapan SPIP dalam pemerintahan tidak terlepas dari berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi selama proses pelaksanaannya. Beberapa permasalahan SPIP yaitu berkaitan dengan keakuratan, perbedaan catatan dengan keadaan sebenarnya, kelebihan pembayaran, dan perhitungan yang tidak valid (Fitri, 2024; Nadirsyah et al., 2024). Daerah yang memiliki total aset yang besar tidak hanya memiliki kapasitas lebih dalam menjalankan pemerintahan, tetapi juga dapat memanfaatkan aset tersebut untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan publik (Sari & Darmastuti, 2023). Menurut Rofiq & Arza, (2021) total asset digunakan untuk mengukur besar pemerintah daerah/kota yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan.

Pada tahun 2023, semua pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah mendapatkan penilaian berkualitas tinggi dalam pelayanan publik dari Lembaga Ombudsman RI, dengan tingkat kepatuhan mencapai 100% dan termasuk kategori zona hijau (Ombudsman, 2023). Akan tetapi, meskipun capaian ini sudah sangat baik, zona hijau tersebut bukanlah titik akhir yang harus dipertahankan secara statis. Pemerintah daerah perlu terus melakukan berbagai inovasi dan perbaikan berkelanjutan agar kualitas pelayanan publik tidak hanya bertahan, tetapi juga meningkat secara signifikan, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja makro pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan di tingkat provinsi maupun nasional. Berbagai temuan telah memeriksa topik kualitas pelayanan publik kaitannya dengan kualitas laporan keuangan, pemilihan wakil daerah, belanja modal daerah, hingga penerapan pelayanan publik pada pemerintah desa dan beberapa kota kecil di Indonesia (Post & Kuipers, 2023; Mulyani et al., 2020; Pramiudi, 2024; Utami & Widarjo, 2022; Furqan et al., 2020; Furqan et al., 2021).

Kualitas pelayanan publik menjadi suatu keharusan lembaga pemerintahan dalam mencerminkan transparansi, akuntabilitas, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban (Akay et al., 2021). Berdasar dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dipengaruhi oleh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit (Furqan et al., 2020; Lestari & Rohman, 2022; Saipuloh et al., 2023; Pramiudi, 2024). Akan tetapi, masih terdapat berbagai faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan publik (Pertiwi & Wibowo, 2022). Faktor terkait SPIP dan ukuran daerah masih belum banyak diteliti (Dewi et al., 2021; Aafiah Millenia, 2022). Selain itu, fokus wilayah pada Provinsi Jawa Tengah belum diteliti, sehingga artikel ini membahas terkait SPIP, ukuran daerah, dan fokus pada wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik terus dilakukan secara berkesinambungan melalui berbagai program dan inovasi. Kerja sama yang baik serta peran aktif dari masing-masing instansi pemerintah daerah maupun kota menjadi faktor penting yang memberikan kontribusi nyata terhadap terciptanya kesejahteraan masyarakat, baik melalui penyediaan layanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif, maupun melalui kebijakan yang tepat sasaran. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tindak lanjut rekomendasi audit, SPIP, dan ukuran daerah terhadap pelayanan publik dengan temuan audit sebagai mediasi pada pemerintah daerah/kota di Jawa Tengah tahun 2021-2023, sehingga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan evaluasi yang mendukung pelayanan publik menjadi lebih baik.

## Ulasan Literatur

### Teori Stewardship

Dalam teori stewardship, terdapat hubungan antara steward dengan pemilik (principal), yang menyebutkan bahwa manajer mengutamakan kepentingan principal (Novianto & Firdaus, 2024). Dalam sektor publik, steward dicerminkan sebagai pemerintah dan principal dicerminkan pada masyarakat. Menurut Papra & Inapty, (2024) teori ini menggambarkan hubungan antara kepuasan dengan keberhasilan suatu organisasi. Pemerintah memegang peranan sebagai pelaksana sekaligus penjaga Amanah dari rakyatnya yang dituntut untuk bertindak jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam setiap langkahnya. Dengan begitu, integritas dan tanggung jawab steward dibutuhkan untuk mencapai kepercayaan dan pelayanan publik. Steward yang dipegang oleh pemerintah lebih mengedepankan kepercayaan dan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat secara penuh. Pelayanan yang diberikan harus mampu menampung aspirasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Audit terhadap Kualitas Pelayanan Publik

Tindak lanjut rekomendasi audit memiliki pengaruh pada penerapan pelayanan publik karena rekomendasi tersebut akan mendorong perbaikan dari kelemahan dalam pengelolaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh komite audit (Vokshi & Xhemajli, 2022). Hasil tindak rekomendasi audit digambarkan menjadi (i) sesuai dengan rekomendasi, (ii) tidak sesuai rekomendasi, (iii) tidak ditindaklanjuti, (iv) tidak dapat ditindaklanjuti (Furqan et al., 2021). Pengukuran tindak lanjut rekomendasi audit menurut Furqan et al., (2020) yaitu dengan besarnya persentase rekomendasi audit yang sesuai dengan rekomendasi dibagi dengan total rekomendasi audit. Penelitian oleh Pertiwi & Wibowo, (2022), menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit memiliki pengaruh positif pada pelayanan publik. Hal tersebut, didukung juga penelitian oleh Widyastuti, (2015), dan Furqan et al., (2021). Akan tetapi, berbeda dengan Lestari & Rohman, (2022) yang menemukan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik.

**H1: Tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah**

### Pengaruh SPIP terhadap Kualitas Pelayanan Publik

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dirancang untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, meningkatkan akuntabilitas, dan mencegah terjadinya penipuan, korupsi, serta penyalahgunaan kekuasaan, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi (Amsaroka et al., 2024). SPIP dalam pemerintahan memiliki fungsi utama untuk mengawasi dan mengendalikan setiap proses dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pengukuran SPIP dilihat berdasarkan level maturitas yang tertera dalam laporan BPKP (Utami & Widarjo, 2022). Riset yang dilakukan oleh (Lustrilang et al., 2023; Utami & Widarjo, 2022) menunjukkan bahwa SPIP berdampak positif terhadap layanan publik dengan memastikan pengeluaran modal yang efektif. Penelitian lain oleh Mulyani et al., (2020) menunjukkan bahwa ketika sistem pengendalian internal lemah, akan berpengaruh pada melemahnya kinerja, sehingga secara tidak langsung bahwa SPIP berpengaruh positif pada pemberian pelayanan publik. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Dewi et al., (2021) apabila SPIP dapat dijalankan dengan efektif dan efisien akan menunjang pelayanan publik.

**H2: SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah**

### Pengaruh Ukuran Daerah terhadap Kualitas Pelayanan Publik

Ukuran daerah merupakan luasnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat (Azahari & Sulardi, 2021). Perbedaan ukuran daerah pada setiap pemerintahan, baik dari segi luas wilayah, jumlah penduduk, maupun kompleksitas permasalahan yang dihadapi, akan mendorong terciptanya kebijakan yang berbeda pula. Menurut Aafiah Millenia,

(2022) ukuran daerah dapat diukur dengan total asset yang tertera pada neraca laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah yang lebih kecil cenderung memiliki klinik kesehatan yang lebih kecil, sehingga berpengaruh pada penyediaan layanan (Post & Kuipers, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif pada pelayanan publik. Penelitian tersebut didukung oleh Hortas-rico, (2018) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah memengaruhi efektivitas layanan yang diberikan. Akan tetapi, berbanding terbalik penelitian oleh Aafia Millenia, (2022) menunjukkan bahwa besar kecilnya pemerintah daerah tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah yang memengaruhi pelayanan publik.

**H3: Ukuran daerah berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah**

Temuan Audit Memediasi pada Hubungan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit dan Kualitas Pelayanan Publik

Efektivitas tindak lanjut terhadap rekomendasi audit akan berdampak pada penurunan jumlah temuan audit. Ketika rekomendasi audit ditindaklanjuti secara tepat dan sesuai dengan ketentuan, kelemahan atau kekurangan yang ditemukan pada pemeriksaan sebelumnya dapat diperbaiki secara sistematis. Penurunan jumlah maupun tingkat keparahan temuan audit ini menjadi indikator adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, baik dari segi efisiensi, transparansi, maupun kepuasan masyarakat. Ditemukan bahwa, temuan audit dapat memediasi hubungan antara tindak lanjut rekomendasi audit dan layanan publik, tetapi dengan tingkatan yang berbeda. Furqan et al., (2020) menemukan bahwa temuan audit berdampak negatif pada kualitas laporan keuangan dan layanan publik karena mengungkapkan kekurangan suatu organisasi. Dalam beberapa hal, temuan audit secara tidak langsung memengaruhi kualitas layanan publik, tetapi dapat memengaruhi faktor lain seperti pendapat audit yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik (Saipuloh et al., 2023).

**H4: Temuan Audit memediasi pada hubungan tindak lanjut rekomendasi audit dan kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah**

Temuan Audit Tidak Memediasi pada Hubungan SPIP dan Kualitas Pelayanan Publik

Penerapan SPIP akan mengurangi jumlah temuan audit karena sistem tersebut mencegah kesalahan, penyimpangan atau kelemahan dalam tata kelola pemerintahan. Ketika jumlah temuan audit menurun, maka mencerminkan peningkatan tata kelola dan kepatuhan yang akan mendorong peningkatan pelayanan publik. Artinya, SPIP tidak hanya berpengaruh terhadap pelayanan publik, tetapi juga secara tidak langsung dapat meminimalkan temuan audit. Temuan audit dapat memediasi hubungan antara SPIP dan pelayanan publik, dengan mengintegrasikan kerangka kerja pada peningkatan pelayanan publik. Auliya Siwi Nugrahani, (2023) menunjukkan bahwa audit kinerja menilai efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dengan mendorong akuntabilitas dan pelayanan publik. Selain itu, penelitian oleh Ghanem, (2024) menunjukkan bahwa audit yang efektif dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Akan tetapi, peningkatan pelayanan publik bergantung pada implementasi dan tantangan sumber daya. Hal ini ditunjukkan berdasarkan pada penelitian Pertiwi & Wibowo, (2022) bahwa temuan menunjukkan peningkatan implementasi SPIP pada tindak lanjut rekomendasi audit yang mungkin strategi untuk meningkatkan pelayanan publik, yang tidak hanya berfokus pada temuan audit.

**H5: Temuan audit tidak memediasi pada hubungan SPIP dan kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah**

Temuan Audit Tidak Memediasi pada Hubungan Ukuran Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik

Ukuran suatu daerah yang besar baik dari luas, jumlah penduduk, maupun jumlah aset, biasanya memiliki suatu aktivitas pemerintahan yang lebih kompleks, sehingga memungkinkan

adanya temuan audit lebih banyak jika tidak dikelola dengan baik. Sebaliknya, jika ukuran daerah dikelola dengan tertib dan sumber daya memadai, maka temuan audit dapat ditekan. Dengan demikian, temuan audit dapat menjelaskan bagaimana ukuran daerah dapat berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Ukuran suatu daerah yang lebih luas pada umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar, dengan ini akan mendukung penyediaan pelayanan publik yang lebih baik (Capaldo et al., 2017). Akan tetapi, efektivitas dari suatu layanan dipengaruhi oleh temuan audit yang berfokus pada beberapa bidang untuk perbaikan dan tata kelola keuangan. Suatu temuan audit yang dilakukan oleh BPK akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga diperlukan adanya transparansi dan akuntabilitas (Indriani & Komala, 2024).

**H6: Temuan audit tidak memediasi pada hubungan ukuran daerah dan kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah**

## Desain Penelitian dan Metodologi

Jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu dengan menguji variabel-variabel yang menjadi objek dan pengembangan informasi baru (Hardani et al., 2020). Jenis data menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui hasil penilaian BPK RI, BPKP Jawa Tengah, BPKP DIY, dan Kemendagri. Penggunaan data sekunder bertujuan untuk memperoleh data secara objektif, sehingga hasil yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sampel yang digunakan menggunakan sampel jenuh, yaitu 29 kabupaten dan 6 kota yang ada di Jawa Tengah dengan rentang waktu 2021-2023. Uji asumsi klasik bertujuan menguji validitas model regresi yang diterapkan dalam penelitian. Uji normalitas yang digunakan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dimana data dianggap normal apabila nilai signifikansi melebihi nilai tengah atau 0.05. Jika nilai signifikan melebihi nilai tengah, maka hasil pengujian dianggap terdistribusi normal (Iba & Wardhana, 2024). Selanjutnya, uji multikolinearitas digunakan untuk menguji gejala multikolinearitas antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas menggunakan uji *VIF* (*Variance Inflation Factor*), dimana nilai *VIF* yang melebihi 10, menandakan multikolinearitas yang signifikan dalam analisis regresi (Iba & Wardhana, 2024).

Uji heteroskedastisitas dilihat dengan pendekatan visual melalui gambar scatterplot dengan pengamatan pada titik-titik yang tersebar diantara kedua sisi angka nol pada sumbu Y. Jika titik tersebar secara acak, maka tidak terdapat masalah pada heteroskedastisitas. Selain itu, dalam pengujian autokorelasi untuk mengetahui hubungan kesalahan pengganggu saat ini dengan periode sebelumnya, menggunakan uji Durbin Watson. Nilai Durbin-Watson dilihat pada batas bawah dan atas yang menunjukkan ada tidaknya masalah autokorelasi (Iba & Wardhana, 2024).

**Tabel 1. Pengukuran Variabel**

Kode	Variabel	Pengukuran
TLRA	Tindak Lanjut Rekomendasi Audit	(Rekomendasi audit yang ditindaklanjuti)/(Total rekomendasi audit)
SPIP	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Level maturitas SPIP
UD	Ukuran Daerah	Ln (Total Aset Pemerintah Daerah/Kota)
KPP	Kualitas Pelayanan Publik	Tingkat pencapaian SPM pada EPPD Kemendagri
TA	Temuan Audit	Jumlah temuan pada LKPD BPK RI

Dengan menggunakan software SPSS, analisis regresi berganda digunakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana variabel variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi yang dibentuk dapat mengidentifikasi masing-masing variabel independen dalam memengaruhi variabel dependen. Model analisis yang digunakan, sebagai berikut:

$$TA = \alpha + \beta_1 TLRA + \beta_2 SPIP + \beta_3 UD + \epsilon \dots \dots \dots 1)$$

$$KPP = \alpha + \beta_1 TLRA + \beta_2 SPIP + \beta_3 UD + TA + \epsilon \dots \dots \dots 2)$$

- TA = Temuan Audit
- KPP = Kualitas Pelayanan Publik
- $\alpha$  = Konstanta

- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien Regresi
- TLRA = Tindak Lanjut Rekomendasi Audit
- SPIP = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- UD = Ukuran Daerah
- $\varepsilon$  = error

Uji sobel test dilakukan untuk melihat pengaruh langsung atau tidak langsung dari variabel tindak lanjut rekomendasi audit, SPIP, dan ukuran daerah terhadap variabel kualitas pelayanan publik melalui temuan audit sebagai variabel intervening (Abu-Bader & Jones, 2021). Uji ini memungkinkan analisis yang lebih dalam terhadap hubungan antar variabel, sehingga dapat menambah pengetahuan ada tidaknya efek mediasi dalam penelitian. Pengujian sobel test dilakukan melalui kalkulator online pada website <https://www.danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id=31>.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

**Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TLRA (X1)	105	1.82	138.10	57.7934	28.45346
SPIP (X2)	105	2.00	3.00	2.9333	.25064
UD (X3)	105	28.53	30.81	29.1439	.43421
KPP (Y)	105	1.72	3.79	3.1358	.40025
TA (Z)	105	3.00	36.00	12.5333	6.94908
Valid N (listwise)	105				

Sumber: Olah data 2025, SPSS

Variabel tindak lanjut rekomendasi audit memiliki nilai minimum 1,82 dan maksimum sebesar 138,10 dengan rata-rata sebesar 57,79. Standar deviasi sebesar 28,45 menunjukkan bahwa penyebaran data tidak bervariasi karena nilai standar deviasinya lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menunjukkan rata-rata sebesar 2,93. Standar deviasi level maturitas SPIP adalah 0,25 yang menunjukkan bahwa penyebaran data tidak bervariasi karena nilai standar deviasi tersebut dibawah rata-rata. Nilai minimum 2,00 dan maksimum 3,00, mengartikan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada umumnya telah diterapkan dengan baik di sebagian besar daerah/kota, meskipun variasinya relatif kecil. Rata-rata nilai ukuran daerah sebesar 29,14 menunjukkan bahwa ukuran daerah suatu pemerintah daerah/kota relatif homogen dengan perbedaan ukuran yang tidak terlalu signifikan antar daerah/kota. Besarnya nilai minimum sebesar 28,53 dan maksimum 30,81. Standar deviasi sebesar 0,43 menunjukkan penyebaran data tidak bervariasi karena nilai standar deviasinya di bawah nilai rata-rata.

Variabel dependen, kualitas pelayanan publik memiliki rentang nilai antara 1,72 hingga 3,79, dengan rata-rata sebesar 3,14 dan standar deviasi sebesar 0,40. Nilai rata-rata ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pada umumnya tergolong kategori cukup baik, meskipun belum mencapai kategori sangat tinggi. Nilai standar deviasi 0,40 mencerminkan daerah yang mungkin masih menghadapi kendala dalam penyediaan pelayanan publik secara optimal. Di sisi lain, temuan audit sebagai variabel intervening memiliki nilai minimum sebesar 3,00 dan maksimum sebesar 36,00, dengan rata-rata sebesar 12,53. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah temuan audit antar pemerintah daerah/kota di Jawa Tengah cukup bervariasi. Rata-rata temuan cukup tinggi mencerminkan bahwa terdapat permasalahan dalam pengelolaan keuangan maupun kinerja instansi pemerintah yang belum sepenuhnya ditangani secara optimal. Nilai standar deviasi 6,95 menunjukkan sebaran data yang tidak terpusat, sehingga terdapat daerah/kota dengan temuan lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

Uji asumsi klasik dilakukan pada penelitian ini untuk memastikan validitas model regresi yang dibangun, sehingga dapat diandalkan. Uji asumsi klasik yang diterapkan yaitu, uji normalitas, uji

multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Setiap uji yang dilakukan dapat memastikan bahwa data memenuhi prasyarat analisis statistic yang digunakan.

**Tabel 3. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.21971690
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.048
	Negative	-.068
Test Statistic		.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Olah data 2025, SPSS

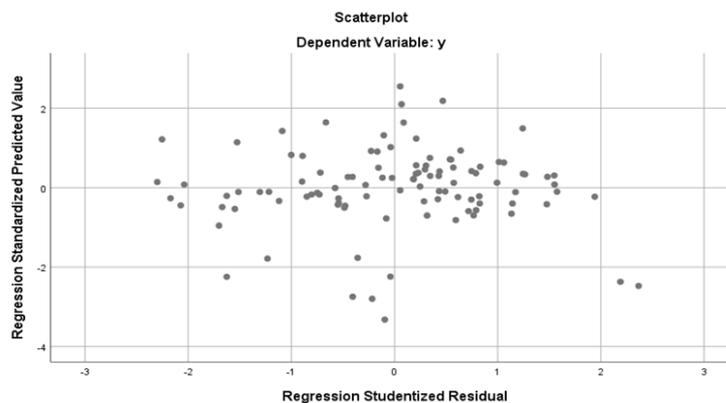
Berdasarkan hasil uji normalitas melalui Kolmogorov-Smirnov pada tabel 3, nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,200. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat diketahui bahwa data berdistribusi normal. Artinya, tidak terdapat penyimpangan yang signifikan. Dengan demikian, asumsi normalitas dapat terpenuhi dan model regresi dapat digunakan dalam analisis berikutnya.

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Tolerance	Statistics VIF
1 (Constant)		
TLRA (X1)	.807	1.240
SPIP (X2)	.955	1.047
UD (X3)	.948	1.055
TA (Z)	.758	1.319

Sumber: Olah data 2025, SPSS

Hasil uji multikolinearitas yang ditunjukkan pada tabel 4 menunjukkan seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Masing-masing variabel independent dan variabel intervning tidak memiliki hubungan linier, sehingga model regresi dapat digunakan pda uji selanjutnya.



**Gambar 1. Hasil Heteroskedastisitas menggunakan Uji Scatterplot**

Sumber: Olah data 2025, SPSS

Berdasarkan gambar 1 uji scatterplot, titik-titik tersebar secara acak di atas dan di bawah nilai 0 dan tidak membentuk pola yang jelas. Pola yang tidak beraturan menandakan bahwa model regresi bersifat konstan. Hal ini menunjukkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas dalam penelitian, sehingga model regresi dapat diartikan memenuhi analisis statistik.

Uji autokorelasi menunjukkan nilai DW terletak antara  $1.7617 < 1.960 < 2.2383$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi linier yang digunakan, baik positif maupun negatif. Ketiadaan autokorelasi tersebut, menunjukkan bahwa model regresi tidak saling berkorelasi satu sama lain, sehingga hasil analisis yang diperoleh dianggap valid.

**Tabel 5. Hasil Uji F (Simultan)**

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.509	4	.877	17.475	.000 <sup>b</sup>
	Residual	5.021	100	.050		
	Total	8.530	104			

Sumber: Olah data 2025, SPSS

Hasil uji simultan ditemukan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. Nilai F sebesar 17,475 dengan regresi sebesar 4 dan residual 100 menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun dapat menjelaskan hubungan antar variabel. Dengan demikian, variabel independen dan variabel dependen berpengaruh signifikan terhadap variabel pelayanan publik sebagai variabel intervening.

**Tabel 6. Hasil Uji Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.641 <sup>a</sup>	.411	.388	.22407	1.960

Sumber: Olah data 2025, SPSS

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diketahui bahwa nilai R Square = 0.411 menandakan bahwa 41,1% variasi dalam kualitas pelayanan publik dapat dijelaskan oleh variabel Tindak Lanjut Rekomendasi Audit, SPIP, Ukuran Daerah, dan Temuan Audit, sedangkan sisanya 58,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Faktor-faktor di luar model penelitian ini dapat berupa budaya organisasi, kebijakan pemerintah, maupun kondisi social-ekonomi masyarakat.

**Tabel 7. Hasil Regresi Linear Berganda**

Model		Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-4.161	1.499		-2.776	.007
	TLRA (X1)	-.050	.034	-.127	-1.492	.139
	SPIP (X2)	.468	.067	.547	6.963	.000
	UD (X3)	.225	.052	.341	4.326	.000
	TA (Z)	-.135	.048	-.249	-2.824	.006

Sumber: Olah data 2025, SPSS

$$KPP = -4.161 - 0.050TLRA + 0.468SPIP + 0.225UD - 0.135TA \dots\dots\dots 2)$$

Berdasarkan pada tabel 7, hasil regresi linear berganda, nilai variabel tindak lanjut rekomendasi audit adalah -0.050, SPIP 0.468, ukuran daerah 0.225, dan temuan audit -0.135. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit dan temuan audit bernilai negatif, sedangkan SPIP dan ukuran daerah bernilai positif. Hal ini mengartikan bahwa semakin rendah sistem pengendalian internal pemerintah dan semakin kecilnya ukuran daerah, maka kualitas pelayanan publik juga semakin rendah.

Uji mediasi pertama menggunakan uji sobel test adalah dengan mediasi Z ke X1 terhadap Y, menunjukkan nilai  $p < 0,05$  menandakan bahwa hasil sobel test signifikan secara statistik. Artinya, temuan audit memediasi pada hubungan tindak lanjut rekomendasi audit dan pelayanan publik di Jawa Tengah. Dengan kata lain, semakin efektif tindak lanjut rekomendasi audit, temuan audit cenderung menurun dan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

Uji mediasi Z ke X2 terhadap Y diketahui nilai  $p$  0,115 yang lebih besar dari batas signifikansi 0,05. Artinya, temuan audit tidak memediasi pada hubungan SPIP dan pelayanan publik di Jawa Tengah. Dengan kata lain, pengaruh SPIP terhadap kualitas pelayanan publik terjadi secara langsung tanpa perantara temuan audit. Hasil uji sobel test pada mediasi Z ke X3 terhadap Y, diketahui nilai  $p$  0,087 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa temuan audit tidak secara signifikan memediasi pada hubungan ukuran daerah dan pelayanan publik di Jawa Tengah.

### **Pembahasan**

Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Berpengaruh Negatif terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Jawa Tengah

Hipotesis pertama berdasar pada hasil uji t, tindak lanjut rekomendasi audit sebagai variabel independent memiliki nilai koefisien sebesar -0.050 ( $p = 0.139 > 0.05$ ) menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan publik bersifat negatif, tetapi tidak signifikan secara statistik. Temuan ini selaras dengan konsep dasar teori Stewardship yang menekankan pentingnya tanggung jawab steward dalam menjalankan amanah publik. Pemerintah sebagai steward seharusnya tidak hanya menindaklanjuti audit sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bentuk komitmen untuk memperbaiki kinerja pelayanan bagi masyarakat (principal). Hasil tersebut sejalan dengan penelitian oleh Lestari & Rohman, (2022) bahwa tindak lanjut rekomendasi audit memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas pelayanan publik, sehingga hipotesis pertama diterima.

SPIP Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Jawa Tengah

Berdasarkan nilai pada uji t menunjukkan koefisien SPIP sebesar 0.468 dengan nilai signifikansi 0.000 ( $< 0.05$ ) menunjukkan bahwa SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Artinya, semakin tinggi penerapan SPIP pada suatu daerah, maka kualitas pelayanan publiknya juga semakin tinggi. Variabel ini memiliki pengaruh paling besar berdasarkan nilai Beta = 0.547. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian oleh (Utami & Widarjo, 2022; Mulyani et al., 2020; Dewi et al., 2021; Lustrilanang et al., 2023) bahwa penerapan SPIP tidak hanya sebagai pengawas internal, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap mutu pelayanan publik yang responsif dan berkualitas. Selain itu, dalam konteks teori stewardship, pemerintah sebagai pengelola bertanggung jawab dalam penerapan SPIP sebagai bentuk komitmen moral dan profesional untuk menjaga integritas organisasi dan memastikan pelayanan publik berjalan secara efektif. Pelayanan yang baik terlaksana dengan penuh kesadaran tanpa harus selalu bergantung pada pengawasan, sehingga hipotesis kedua diterima.

Ukuran Daerah Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Jawa Tengah

Uji statistik t pada hipotesis ketiga, diketahui bahwa ukuran daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik dengan koefisien 0.225 ( $p = 0.000$ ). Artinya, semakin besar ukuran daerah, cenderung memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pelayanan publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Post & Kuipers, 2023; Hortas-rico, 2018) bahwa ukuran daerah mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Terkait dengan konsep teori stewardship keberhasilan pelayanan di daerah yang lebih besar tidak hanya bergantung pada kekayaan wilayah, tetapi pada tanggung jawab steward kepada principal dengan menggunakan sumber daya secara optimal untuk kepentingan masyarakat, sehingga hipotesis ketiga diterima.

Temuan Audit Memediasi pada Hubungan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit dan Kualitas Pelayanan Publik di Jawa Tengah

Pada uji hipotesis keempat menggunakan uji sobel test, diketahui nilai  $p$  0.015 < 0.05. Artinya, bahwa temuan audit memediasi hubungan tindak lanjut rekomendasi audit dan pelayanan publik. Dengan kata lain, tindak lanjut rekomendasi audit tidak secara langsung memengaruhi kualitas

pelayanan publik, tetapi melalui pengaruhnya dalam menurunkan jumlah temuan. Dalam perspektif teori stewardship, pemerintah sebagai steward merespon temuan audit sebagai bagian dari menjaga integritas, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan. Dengan demikian, semakin tinggi kualitas dan kuantitas tindak lanjut yang dilakukan, semakin baik peran steward dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Hasil temuan ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Furqan et al., 2020; Saipuloh et al., 2023) bahwa terdapat faktor lain yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis keempat diterima.

Temuan Audit Tidak Memediasi pada Hubungan SPIP dan Kualitas Pelayanan Publik di Jawa Tengah

Uji sobel test untuk hipotesis kelima menunjukkan nilai  $p = 0.115 > 0.05$ . Hasil tersebut menandakan bahwa temuan audit tidak memediasi hubungan SPIP dan pelayanan publik di Jawa Tengah. Artinya, pengaruh SPIP terhadap pelayanan publik terjadi secara langsung tanpa perantara temuan audit. Kaitannya dengan konsep pada teori stewardship, peran pemerintah dalam penerapan SPIP mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan secara langsung. SPIP dapat tercermin secara optimal, meskipun tidak melalui temuan audit. Hasil temuan ini sejalan dengan Pertiwi & Wibowo, (2022) bahwa implementasi SPIP dan tindak lanjut rekomendasi audit perlu ditingkatkan, dibanding dengan hanya mengandalkan temuan audit. Dengan demikian, hipotesis kelima diterima.

Temuan Audit Tidak Memediasi pada Hubungan Ukuran Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik di Jawa Tengah

Dalam uji sobel test temuan audit dapat memediasi ukuran daerah dan kualitas pelayanan publik, ditunjukkan dengan nilai  $p = 0.087 > 0.05$ . Ukuran suatu daerah cenderung memberikan pengaruh secara langsung terhadap pelayanan publik tanpa perantara temuan audit. Hasil temuan ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Indriani & Komala, 2024; Capaldo et al., 2017) bahwa temuan audit akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah dengan didorong penerapan akuntabilitas. Selaras dengan teori stewardship, peran pemerintah dalam memanfaatkan kapasitas wilayahnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dapat mendorong keberhasilan pelayanan publik. Daerah dengan ukuran besar dan sumber daya yang memadai dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara langsung apabila pemerintah dapat memanfaatkannya dengan tujuan kepentingan masyarakat. Dengan begitu, hipotesis keenam diterima.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat ditemukan kesimpulan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah. Selain itu, ditemukan SPIP memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah, sehingga hal ini harus terus ditingkatkan untuk menjaga kualitas pelayanan publik. Temuan lain menunjukkan bahwa ukuran daerah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah. Temuan audit memiliki peran memediasi hubungan tindak lanjut rekomendasi audit dan pelayanan publik di Jawa Tengah. Semakin efektif suatu instansi pemerintah menindaklanjuti rekomendasi audit, maka semakin kecil temuan yang muncul, sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi, temuan audit tidak memediasi hubungan SPIP dan pelayanan publik di Jawa Tengah serta tidak memediasi hubungan ukuran daerah dan pelayanan publik di Jawa Tengah.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman terkait kualitas pelayanan publik yang dapat mendukung konsep tata kelola pemerintahan. Suatu pemerintahan yang baik dapat tercermin dari kemampuan pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi audit, meminimalkan temuan, dan menjadikan hasil audit sebagai perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan pemerintah daerah/kota yang ada di Jawa Tengah untuk meningkatkan efektivitas tindak lanjut rekomendasi audit dan memperkuat SPIP guna meminimalkan temuan audit. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh BPK, BPKP, maupun

Kemendagri sebagai bahan evaluasi dalam merancang mekanisme pemantauan tindak lanjut yang lebih efektif.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dalam perspektif masyarakat maupun pemerintah secara langsung melalui data primer, baik wawancara maupun kuisisioner, serta dapat memperluas cakupan wilayah di luar Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, penelitian ini hanya menguji hubungan antar variabel secara kuantitatif tanpa mengeksplorasi faktor lain seperti budaya organisasi yang mungkin berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan publik.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi selama proses penelitian hingga penyusunan artikel. Ucapan terima kasih juga kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BPK RI, BPKP Jawa Tengah, BPKP DIY, dan Kemendagri RI yang telah memberikan data dan akses dalam pengumpulan data penelitian.

## Referensi

- Aafiah Millenia, N. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(6), 786-803. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i6.448>
- Abu-Bader, S., & Jones, T. V. (2021). Statistical Mediation Analysis Using the Sobel Test and Hayes Spss Process Macro. *International Journal of Quantitative and Qualitative Research Methods*, 9(1), 42-61.
- Aikins, A. E., Mensah, J. V., & Program, G. (2023). Indonesia Auditing Research Journal Internal auditing and institutional performance of local governments in Ghana. *Indonesia Auditing Research Journal*, 12(3), 134-142.
- Akay, R., E. Kaawoan, J., & N. Pangemanan, F. (2021). Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Tikala. *Governance*, 1(1), 47. <https://doi.org/10.31293/ddk.v24i2.6893>
- Amsaroka, M. H., Yadiati, W., & Winarningsih, S. (2024). Literature Review: The Relationship Between Internal Control System Of The Government (SPIP), Good Government Governance (Ggg), And Fraud Prevention. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit, Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 8(1), 122-136.
- Auliya Siwi Nugrahani. (2023). Literatur Review: Pengaruh Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik dengan Pengawasan Fungsional sebagai Moderator. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(1), 131-138. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i1.1758>
- Azahari, A. A., & Sulardi, S. (2021). Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit, dan Ukuran Daerah terhadap Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(2), 294. <https://doi.org/10.20961/jab.v21i2.655>
- Azhar, Z., Alfian, E., Kishan, K., & Assanah, N. H. (2022). Accrual Accounting at Different Levels of the Public Sector: A Systematic Literature Review. *Australian Accounting Review*, 32(1), 36-62. <https://doi.org/10.1111/auar.12357>
- Capaldo, G., Costantino, N., & Pellegrino, R. (2017). The Effect of More Demanding Public Services Quality Standards on the Organization of Service Providers. *International Journal of Public Administration*, 40(10), 847-859. <https://doi.org/10.1080/01900692.2017.1295263>
- Dewi, N. L., Gunawan, Y., Mangunsong, S., & Meiliana, Y. (2021). Pengaruh sistem pengendalian internal dan budaya organisasi terhadap kualitas pelayanan publik berkelanjutan. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 20(2), 99-106. <https://doi.org/10.28932/jmm.v20i2.3024>
- Fitri, W. (2024). Analisis Temuan Audit Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) BPK Di

- Provinsi Sumatera Barat TA 2017-2021. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 2681–2689.
- Furqan, A. C., Wardhani, R., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2020). The effect of audit findings and audit recommendation follow-up on the financial report and public service quality in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 33(5), 535–559. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-06-2019-0173>
- Furqan, A. C., Wardhani, R., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2021). Financial reporting, public services and local executives' re-electability in Indonesia. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1939229>
- Ghanem, M. G. (2024). Mediating Impact of Perceived Functional Value of Audit Service on the Relationship between Audit Characteristics and its Effect on Customer Satisfaction with Total Quality Management in Egyptian Hospitals. 8(2), 1–46. <https://doi.org/10.21608/aljalexu.2024.371057>
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, N. H. A. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).
- Hortas-rico, M. (2018). *International Center for Public Policy International Center for Public Policy February 2018 Is there an Optimal Size for Local Etermines Citizenrust : Evaluatingt Governments ?*
- Iba, Z., & Wardhana, A. (2024). Uji Asumsi Klasik. In M. Pradana (Ed.), *Analisis Regresi dan Analisis Jalur untuk Riset Bisnis menggunakan SPSS 29.0 & SMART-PLS 4.0* (1st ed., Issue July, pp. 40–56). Eureka Media Aksara.
- Indriani, R., & Komala, L. (2024). *The Effect of Regional Expenditure , Balancing Funds and BPK Audit Findings on Regional Government Financial Performance*. 2(1), 44–55.
- Lestari, A. D., & Rohman, A. (2022). Pengaruh Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Melalui Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada LKPD Kabupaten Daerah Tertinggal di Indonesia Tahun 2016-2017). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(2), 1–13.
- Lustrilanang, P., Suwarno, Arif, B., & Subowo, H. (2023). The effect of auditing quality and internal control on financial resilience in public sector organizations: Information quality as the mediating factor. *International Journal of Data and Network Science*, 7(4), 1573–1580. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.8.006>
- Muluk, M. R. K., Pratama, M. R., & Muzaqi, A. H. (2021). The Landscape of Inclusive Public Service Innovation in Indonesian Local Government. *Proceedings of the 3rd Annual International Conference on Public and Business Administration (AICoBPA 2020)*, 191(March). <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210928.090>
- Mulyani, S., Munir, D. A., Akbar, B., Yoseph, M., & Sudrajat. (2020). The significance of the internal control system implementation on village government performance. *Opcion*, 36(Special Edition 27), 1278–1291.
- Nadirsyah, Indriani, M., & Mulyany, R. (2024). Enhancing fraud prevention and internal control: the key role of internal audit in public sector governance. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2382389>
- Novianto, W., & Firdaus, F. (2024). *Teori Corporate Governance*: 8(2), 1568–1574. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i2.1997>
- Ombudsman, O. (2023). *Jawa Tengah Raih Opini Kualitas Tinggi Pelayanan Publik 2023 dari Ombudsman RI*. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--jawa-tengah-raih-opini-kualitas-tinggi-pelayanan-publik-2023-dari-ombudsman-ri>
- Papra, A. S., & Inapty, B. A. (2024). *Pengaruh Penggunaan Siskeudes , Kompetensi SDM Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening*. 8, 4611–4627.
- Pertiwi, P. K., & Wibowo, P. (2022). Government Reporting and Quality of Public Services: Are They

- Twins? *Journal of Accounting and Investment*, 24(1), 1–24. <https://doi.org/10.18196/jai.v24i1.16193>
- Post, A. E., & Kuipers, N. (2023). City Size and Public Service Access: Evidence from Brazil and Indonesia. *Perspectives on Politics*, 21(3), 811–830. <https://doi.org/10.1017/S1537592722003176>
- Pramiudi, U. (2024). Determinant: Follow-up of Audit Result Recommendations on the Quality of Regional Government Financial Reports. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(3), 431–440. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i3.2767>
- Putu, N. (2024). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 55–67. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.328>
- Rahayu, S. P., Aripin, R. R., & Ahmad, I. S. (2020). Pemodelan Regresi Multivariat pada Penentuan Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kesejahteraan di Jawa Tengah. *Jurnal Varian*, 3(2), 125–138. <https://doi.org/10.30812/varian.v3i2.654>
- Rofiq, I., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai dan Leverage Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 705–719. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.414>
- Saipuloh, S., Ismail, T., & Adha, W. M. (2023). The Effect of Audit Findings, Follow-Up Audit Recommendations, And BPK Opinions from The Previous Year on The Determination of Opinions in Local Government Financial Statements. *Economics, Business, Accounting & Society Review*, 2(1), 58–73. <https://doi.org/10.55980/ebasr.v2i1.56>
- Sakti, A. D. F., Triyono, & Setiaji, B. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Intervening. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(2), 777–791.
- Sari, D. N., & Darmastuti, D. (2023). Internal control weaknesses: Its relationship with local government characteristics and follow-up on audit results. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 27(1), 97–105. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol27.iss1.art10>
- Syofyan, E., Septiari, D., Dwita, S., & Rahmi, M. (2021). The characteristics of the audit committee affecting timeliness of the audit report in Indonesia. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1935183>
- Utami, B. P., & Widarjo, W. (2022). Quality of Public Services in Local Governments in Indonesia : A Study of Capital Expenditures and Government Internal Control Systems. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 5(9), 2565–2575. <https://doi.org/10.47191/jefms/v5-i9-12>
- Vokshi, B., & Xhemajli, A. (2022). Internal Audit in The Public Sector in Kosovo: Promoting Good Governance and Improving Performance. *Quality - Access to Success*, 23(189), 160–164. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.189.18>
- Widyastuti, T. D. (2015). *Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah*. 6.
- Yamin, R., Mas'ud, M., & Sjarlis, S. (2022). Management of Assets and Follow-Up the Findings of the Audit Board to Increase Financial Performance of Local Governments. *Economics, Business, Accounting & Society Review*, 1(1), 37–43. <https://doi.org/10.55980/ebasr.v1i1.8>
- Yuni, O., & Triyono, T. (2022). Analisis Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 136–145.